

BAB IV

—FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBAKAN MEMBURUKNYA HUBUNGAN DIPLOMATIK KOREA UTARA DAN KOREA SELATAN PASCA DILANTIKNYA LEE MYUNG BAK MENJADI PRESIDEN KOREA SELATAN

Pada masa pemerintahan Presiden Kim Dae-jung (1998-2003) terjadi perbaikan hubungan Korea Utara-Selatan pasca perang Korea. Melalui sebuah kebijakan yang terkenal dengan nama 'Sunshine policy', Dae-jung mencoba merangkai lagi hubungan baik antara ke dua negara . Korea Selatan mencoba merangkul saudaranya di Korea Utara dengan membangun hubungan diplomatik yang lebih baik serta memberi bantuan ekonomi. Waktu terjadi krisis kelaparan di Korea Utara tahun 2000 yang menyebabkan banyak rakyatnya mati kelaparan, Korea Selatan memberikan bantuan makanan, obat-obatan serta pupuk bagi para petani. Korea Selatan juga melakukan investasi besar-besaran dengan membuka kawasan industri di daerah Utara tepatnya di Kawasan Industri Kaesong. Jutaan dolar diinvestasikan di sini. Terdapat 90 perusahaan Korea Selatan membuka cabangnya di Kaesong dan mempekerjakan 33,000 orang buruh orang Korea utara. Selain itu Korea selatan juga membantu pengembangan pariwisata Gunung Kumgang, sebuah kawasan wisata tercantik di semenanjung ini dibuka untuk umum.

Kebijakan Sinar Matahari menjadi sebuah kebijakan bersejarah yang menghantarkan Kim Dae-jung menjadi seorang peraih Nobel Perdamaian pertama dari negara ini pada tahun 2000. Komentar-komentar bernada optimistis akan terwujudnya reunifikasi antar kedua Negara bermunculan seiring dengan gemuruh tepuk tangan untuk nobel yang berhasil digondol Dae-jung yang katanya dipersembahkan untuk rakyat Korea itu.

Pada masa pemerintahannya, Presiden Roh Moo hyun melanjutkan kebijakan sinar matahari dari pendahulunya. Pada tahun 2003, isu mengenai kepemilikan senjata nuklir oleh Korea Utara muncul kembali, dimana kedua Negara Korea Utara dan AS saling menuduh satu sama lain melanggar perjanjian kerangka kerja. Namun demikian, presiden Roh tetap menjalankan kebijakan tersebut dan pemerintahannya tetap memberikan bantuan kemanusiaan terhadap Korea Utara. Kedua pemerintahan tetap melanjutkan kerjasama proyek yang dimulai dibawah pimpinan Kim Dae Jung dan juga memulai pembangunan kawasan industry Kaesong, dimana Korea Selatan mengabdikan dana sebesar 324 juta dolar untuk bantuan terhadap Korea Utara ditahun 2005

Kebijakan sinar matahari adalah kebijakan luar negeri Korea Selatan terhadap Korea Utara hingga terpilihnya Lee Myung menjadi presiden pada tahun 2008. Doktrin tersebut menekankan pada kerjasama melalui perdamaian, mencari rekonsiliasi jangka pendek sebagai sebuah pendahuluan menuju reunifikasi Korea. Sejak terpilihnya Lee Myung-bak sebagai presiden baru Korea Selatan yang dilantik bulan Februari 2008 lalu situasi di semenanjung Korea berubah.

Tekad untuk menjalankan kebijakan garis keras terhadap Korea Utara berkaitan dengan program nuklir mereka, memperburuk hubungan keduanya. Berita dikoran menyebutkan Korea Utara malah mengancam akan menggelar perang fisik dengan Korea Selatan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, dapat dianalisa mengenai empat faktor dominan yang menyebabkan memburuknya hubungan diplomatik Korea utara dan Korea Selatan pasca dilantiknya Lee Myung Bak menjadi Presiden. Yang pertama yaitu penghentian bantuan ekonomi Korea Selatan oleh pemerintahan Presiden Lee terhadap Korea Utara. Faktor yang kedua, yakni kebijakan Korea Utara untuk tetap melanjutkan program nuklirnya. Faktor pertama dan kedua terjadi karena adanya perbedaan persepsi antara kedua Korea. Masing-masing pihak memiliki persepsi yang berbeda pada setiap kebijakan yang dilakukan oleh salah satu pihak.

Faktor ketiga yaitu peningkatan kekuatan militer Korea Selatan sebagai respon terhadap uji coba nuklir Korea Utara. Sedangkan faktor keempat yakni peningkatan militer Korea Utara sebagai langkah pencegahan menghadapi serangan Korea Selatan dan Amerika Serikat. Kedua Negara sama-sama menghendaki keamanan bagi negaranya, namun disisi lain peningkatan kekuatan militer salah satu Negara ternyata mengancam keamanan Negara lain. Hal ini yang disebut dengan security dilemma.

A. Perbedaan Persepsi Korea Selatan dan Korea Utara

Konflik yang terjadi di semenanjung Korea antara Korea Utara dan Korea Selatan salah satu penyebabnya adalah adanya perbedaan pandangan antara kedua belah pihak dalam memandang dan menyikapi sikap dan kebijakan yang diambil oleh masing-masing Negara. Korea Selatan memandang bahwa program pengembangan nuklir yang dilakukan oleh Korea Utara dapat membahayakan negaranya. Korea Selatan menganggap Korea Utara bisa kapan saja menyerang negaranya, karena secara teknis kedua Negara itu masih berperang. Oleh karena itu, Korea Selatan mengeluarkan kebijakan yang tegas agar Korea Utara pelan-pelan mau menghentikan program nuklirnya.

Namun Korea utara berpendapat lain, bahwa kebijakan yang dilakukan oleh Korea selatan dianggap sebagai sebuah konfrontasi terhadap Korea Utara. Korea Utara berpendapat bisa saja AS dan Korsel berencana untuk melakukan Agresi terhadap Korea Utara. Oleh karena itu Korea Utara bersikeras untuk tetap mempertahankan mengembangkan senjata nuklirnya dan tidak mau melakukan denuklirisasi. Perbedaan pandangan dan perbedaan kepentingan antara Korea Utara dan Korea Selatan inilah yang mendasari munculnya sikap keras dari kedua belah pihak sehingga menimbulkan konflik antar kedua negara. Dalam pembahasan selanjutnya akan dijelaskan mengenai kebijakan masing-masing Negara yang menjadi penyebab memburuknya hubungan kedua Negara pada era pemerintahan presiden Lee Myung Bak.

1. Kebijakan Penghentian Bantuan Ekonomi Korea Selatan Terhadap Korea Utara

Selama satu dekade, Korea selatan adalah salah satu pendonor terbesar kepada Korea utara dengan mengirim ratusan ribu ton makanan ke zona demiliterisasi setiap tahunnya. Korea selatan mengirimkan 400.000 ton beras dan 300.000 ton pupuk pada tahun 2007 kepada tetangganya yang miskin itu, yang mengalami kekurangan pangan. Namun pengiriman bantuan itu dihentikan dan hubungan memburuk setelah pemerintah konservatif berkuasa di Seoul pada tahun 2008 dan mengkaitkan bantuan pangan dan kerjasama ekonomi pada kemajuan perlucutan nuklir Korea utara.

Tindakan itu memicu hubungan kedua Korea tegang dan semakin tegang setelah Korea utara menguji coba rudal dan nuklirnya. Korea Utara untuk pertama kalinya melakukan serangan verbal terhadap Presiden Korsel, Lee Myung-Bak, pada tanggal 1 April 2009. Sebuah komentar di harian milik pemerintah Korea Utara, *Rodong Sinmun* menyatakan kebijakan keras Lee terhadap Korea Utara kelak akan menimbulkan bencana.²⁰

Pada tahun 2006, setelah uji coba senjata rudal dan nuklirnya pada bulan September 2006, Korea Utara memperoleh sanksi dari dunia Internasional yakni embargo ekonomi dan penghentian bantuan internasional. Korea Selatan termasuk salah satu Negara yang memberikan sanksi terhadap Korea Utara. Pada masa itu,

²⁰ <http://hariansib.com/?p=89722>

Korea Selatan dipimpin oleh Presiden Roh Moo hyun menunda pengiriman bantuan ke Korea Utara.²¹

Namun beberapa bulan kemudian Korea Selatan mengumumkan mengirimkan paket bantuan daruratnya senilai 230 US dollar dengan alasan sebagai bantuan kemanusiaan sehubungan dengan musibah yang melanda Korea Utara. Barang-barang yang dikirim oleh Korea Utara tersebut antara lain 100.0000 Ton Beras, 100.000 Ton Semen, 210 Truk sampah atau perlengkapan konstruksi lainnya, 10.000 paket bantuan dan 80.000 selimut. Bantuan tetap diberikan kepada Korea Utara dengan alasan untuk mencegah krisis pangan yang kronis yang dapat mengakibatkan pengungsian besar-besaran ke Korea Selatan.

Korea Utara juga mengecam Presiden Korsel Lee Myung-Bak karena dinilai melanggar secara kasar perjanjian yang dicapai dalam beberapa konferensi tingkat tinggi pada 2000 dan 2007. Korut mempergencar serangan retorika terhadap pemerintahan Lee Myung-bak yang berkuasa di Korsel. Sementara, pemerintahan Presiden Lee berjanji untuk menghentikan aliran bebas bantuan ke Korut, kecuali Pyongyang mengakhiri program senjata nuklir.

Hubungan kedua negara ini memburuk sejak Presiden Korea Selatan Lee Myung-bak menempuh pendekatan yang lebih keras terhadap Utara. Presiden Lee setelah ia dilantik sebagai Presiden Korea Selatan menghentikan bantuan ekonomi

²¹ <http://medlaindo.co.id/KorselTundaPengapalanBantuankeKorut>

terhadap Korea Utara sebagai sanksi terhadap uji coba nuklir Korea Utara dan sikap keras Korea Utara yang tidak mau melucuti senjata nuklirnya.

—Dalam—beberapa bulan terakhir, Korea Utara telah berulang kali mengancam akan menghancurkan pemerintahan konservatif di Korsel yang dipimpin Presiden Lee Myung-bak. Lee menghentikan aliran bantuan ke Korut yang telah berlangsung selama 10 tahun sejak mulai berkuasa 2008 lalu. Menanggapi ancaman Korea Utara, Presiden Lee menyatakan tetap akan mempertahankan kebijakan keras terhadap Korut. Dia menyatakan optimistis bahwa hubungan kedua Korea akan membaik dalam waktu tidak terlalu lama.

Terdapat beberapa alasan mengapa Presiden Lee menggunakan pendekatan yang berbeda dengan para pendahulunya mengenai masalah pengembangan senjata nuklir Korea Utara. Yang pertama, Presiden Lee menganggap Kebijakan yang diambil oleh presiden sebelumnya terbukti kurang efektif. Jutaan dollar bantuan ekonomi yang dikirim oleh pemerintah Korea Selatan selama bertahun-tahun tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya oleh rezim Kim Jong Il. Hal ini terbukti, meskipun Korea Utara mendapatkan bantuan ekonomi dari beberapa Negara tetangga seperti China dan Korea Selatan, namun krisis makanan, kelaparan masih tetap terjadi di Korea Utara. Hal ini patut dipertanyakan mengapa rakyat Korea Utara masih mengalami kelaparan dan krisis makanan, kemudian digunakan untuk apakah dana bantuan yang diberikan oleh Negara pendonor tersebut setiap tahunnya.

Bahkan Korea Selatan merasa curiga dana bantuan tersebut digunakan untuk membiaya pengembangan program nuklir Korea Utara. Jika hal ini terjadi, maka secara tidak langsung selama bertahun-tahun pemerintah Korea Selatan ikut serta mendanai program pengembangan senjata nuklir Korea Utara tersebut. Oleh karena itu, kebijakan "sinar matahari" dianggap tidak efektif untuk melakukan denuklirisasi Korea Utara.

Alasan kedua yakni, Presiden Lee ingin memberikan sanksi yang lebih tegas terhadap Korea Utara agar Korea Utara segera menghentikan program senjata nuklirnya. Menurut Presiden Lee perlucutan senjata nuklir Korea Utara merupakan satu-satunya cara untuk menciptakan stabilitas kemananan dan perdamaian di semenanjung Korea. Selama ini Korea Selatan sudah cukup bersikap lunak terhadap Korea Utara. Hal itu dilakukan oleh pemerintahan sebelumnya, karena Korea Selatan percaya hanya dengan cara damai Korea Utara pelan-pelan akan menghentikan program nuklirnya dan akan membuka diri terhadap dunia internasional.

Namun ternyata langkah tersebut tidak membuat Korea Utara menghentikan uji coba nuklirnya. Mempertimbangkan pengalaman sebelumnya, Korea Selatan menganggap hanya dengan memberikan sanksi tegas terhadap Korea Utara maka Korea Utara akan segera melucuti senjata nuklirnya. Namun tindakan tersebut tidak sepenuhnya berhasil, malah sikap tegas Presiden Lee dianggap sebagai langkah yang konfrontatif oleh Korea Utara.

Dengan mempertimbangkan alasan tersebut, akhirnya presiden Lee mengambil langkah untuk menghentikan bantuan ekonomi terhadap Korea Utara. Namun sebelum menghentikan program bantuan rutin tiap tahun tersebut, Pemerintah Korea selatan memberikan penawaran terlebih dahulu kepada Korea Utara. Apabila Korea Utara mau melakukan denuklirisasi, maka Korea Selatan akan melanjutkan pemberian bantuan ekonomi, dan akan membantu meningkatkan perekonomian Korea Utara dan akan melakukan kerjasama perdangan dan industri. Namun penawaran tersebut ditanggapi secara dingin oleh korea Utara. Bahkan, Korea Utara meradang dan menganggap Korea Selatan mengajak Korea Utara untuk berperang. Sehingga menyebabkan memburuknya hubungan kedua Negara.

—Sejak 30 Januari 2009, Korea Utara membatalkan semua perjanjian damai dengan Korea Selatan. Korea Utara menyatakan semua perjanjian politik dan militer akan dianulir, termasuk perjanjian perbatasan di Laut Kuning. Pernyataan Korea Utara dengan jelas menyebutkan tentang pakta nonagresi yang ditandatangani kedua negara tahun 1991, yang disebut Perjanjian Dasar bahwa keduanya tidak akan saling serang dan mengupayakan reunifikasi damai, tidak berlaku lagi. Korea Utara menuding Korea selatan sengaja mendorong hubungan kedua negara tersebut ke ambang perang.

Jika pemerintah Myung-bak tidak menghentikan kebijakan konfrontasinya, maka Korea Utara akan membuat Korea Selatan menjadi puing-puing. Salah satu perjanjian yang dikatakan Korea Utara dibatalkan mencakup perbatasan maritim

di Laut Kuning. Menurut Korea Utara, Lee Myung-Bak semestinya tak salah menilai mengenai kesabaran dan diamnya Korea Utara selama ini. Rezim Lee akan menanggung akibat dari pembekuan hubungan antar-Korea dan mengganggu stabilitas dan perdamaian di Semenanjung Korea.²²

Kebijakan Presiden Lee yang mengaitkan bantuan ekonomi dengan penghentian program nuklir Korut pun dianggap sebagai pernyataan perang. Lee juga dituding sedang mencari aliansi militer dengan AS dan Jepang. Langkah ini meningkatkan ketegangan di dan sekitar wilayah Semenanjung Korea dan meningkatkan bahaya akan munculnya perang nuklir. Hal itu dipicu oleh sikap bermusuhan rezim Pemerintah Korea Selatan di bawah Presiden Lee Myung-bak terhadap rezim komunis Korea Utara.

Meskipun mendapat ancaman dari Korea Utara, Presiden Lee tetap berkomitmen pada sikapnya. Pihaknya hanya akan mengirimkan bantuan non kemanusiaan apabila Korea Utara bersedia melucuti senjata nuklirnya. Presiden Lee tetap optimis langkah yang diambil tersebut akan berhasil membawa Korea Utara menuju denuklirisasi dan akhirnya akan menciptakan perdamaian di semenanjung Korea.

Dari data-data yang disebutkan diatas maka dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa penghentian bantuan ekonomi oleh pemerintah Korea Selatan terhadap Korea Utara merupakan salah satu pemicu memburuknya hubungan diplomatic Korea Utara dan Korea Selatan. Kebijakan pemerintah Korea Selatan

²² <http://hariansib.com/?p=89722>

tersebut membuat Korea Utara marah karena merasa telah dikhianati oleh Korea Selatan, karena pada dasarnya Korea Utara sangat membutuhkan bantuan ekonomi dari Negara-negara lain. Terlebih lagi Korea Selatan merupakan pendonor terbesar bagi Korea Utara selama satu dekade. Wajar apabila penghentian bantuan ekonomi tersebut membuat Korea Utara sangat marah dan merasa kebijakan tersebut sebagai sikap permusuhan yang ditunjukkan Korea Selatan.

Namun meskipun beresiko meningkatkan ketegangan dengan Korea Utara, pihak Korea Selatan bersikeras bahwa sanksi penghentian bantuan ekonomi tersebut merupakan langkah yang tepat. Karena Kebijakan 'sinar matahari' yang telah berlangsung selama sepuluh tahun itu dianggap gagal untuk menghentikan Korea Utara dari ambisi senjata nuklirnya, dan bahkan mungkin secara tidak langsung ikut mendanainya.

2. Kebijakan Korea Utara untuk tetap melanjutkan program pengembangan nuklir

Sejak memegang jabatan sebagai Presiden Korea Selatan, Lee Myung-Bak menghentikan bantuan tanpa syarat kepada Korea Utara serta beberapa bantuan lainnya, dengan mensyaratkan ketentuan negara itu melucuti program nuklirnya. Namun Korea Utara menanggapi hal itu dengan menuduh Lee menghancurkan hubungan kedua negara bersaudara itu dan telah mengumumkan bahwa pakta

nonagresi yang disepakati tahun 1992, serta berbagai perjanjian antara kedua Korea, sekarang tidak berlaku lagi.

Korea Utara (Korut) dilaporkan telah memindahkan peluru-peluru kendali Taepodong-2 ke tempat peluncurannya di pantai timur laut Korut. Taepodong-2 diyakini mampu mencapai Alaska, Amerika Serikat. Negara komunis itu mengatakan mereka mempunyai hak untuk mengembangkan "program pengembangan luar angkasa".

Salah satu alasan utama Korea Utara berambisi melanjutkan program nuklirnya, menurut presiden Lee adalah untuk menggabungkan kekuasaan agar tetap berada di tangan keluarga Kim Jong il. Kim juga menginginkan Korea Utara untuk mencapai status sebagai Negara yang kuat. Tentu saja dengan kondisi perekonomian yang terpuruk dia tidak bisa mencapai status Negara yang memiliki perekonomian yang kuat, sehingga dengan memiliki senjata nuklir, dia berusaha mewujudkan tujuan tersebut. Presiden Lee, khawatir terhadap dampak nuklir Korea Utara seperti yang terjadi di Negara Iran dan Syria.²³

Meningkatnya ketegangan di Asia Timur akhir-akhir ini hanyalah sebuah episode dari perjalanan Korut dalam mengembangkan senjata nuklirnya sejak tahun 1970. Perjalanan panjang Korut dalam mengembangkan kemampuan tersebut kendati harus menanggung sanksi ekonomi yang berat membuat banyak pihak bertanya-tanya, apakah sebenarnya motif Korut mengembangkan senjata nuklirnya. Lebih jauh lagi, dapatkah dunia internasional membujuk Korut untuk

²³ <http://online.wsj.com/article/SB124484758194711341.html>

meninggalkan ambisi nuklirnya. Jawaban pertanyaan-pertanyaan ini sangat penting karena prospek penyelesaian damai bagi masalah nuklir Korea Utara akan sangat bergantung pada sejauh mana dunia internasional dapat memahami motif ambisi nuklir Korea Utara dan mengakomodasinya dalam proses negosiasi Six-Party Talk.

Pada tanggal 16 Oktober 2002 AS menuding Korea Utara menjalankan program nuklir lain. Pasokan minyak dihentikan secara sepihak. Korea Utara melawan dengan mengaktifkan kembali fasilitas Yongbyon pada 22 Desember 2003 dan akhirnya pada 10 Januari 2003 menarik diri dari kesepakatan tentang Pengawasan persenjataan nuklir (NPT). Pada bulan Januari 2003, Korea Utara mendeklarasikan penarikan dirinya sebagai anggota dari perjanjian internasional Non-Poliferasi. Keluarnya Korut dari NPT merupakan salah satu dari perkembangan negatif setelah perjanjian non Poliferasi di bentuk.

Sejak keluar dari NPT, Korut tetap mengembangkan snejata nuklirnya dan seringkali melakukan uji coba nuklirnya yangs angat membahayakan keselamatan Negara lain khususnya di semenanjung Korea. Untuk itulah, Presiden Lee yang merasa keamanan negaranya terancam dan stabilitas keamanan di semenanjung Korea juga terancam memutuskan untuk bersikap tegas terhadap program nuklir Korea Utara. Namun, ternyata Korut memutuskan untuk tetap melaksanakan program nuklir meski emndapat sanksi dari berbagai pihak. Hal ini semakin emngingkatkan ketegangan di semenanjung Korea, karena masing-masing Negara tetap mempertahankan kebijakannya.

Tepatnya pada tanggal 25 Mei 2009, Korea Utara kembali mengejutkan masyarakat internasional. Negara berpaham sosialis itu tiba-tiba melakukan uji coba peledakan nuklir bawah tanah, sekaligus meluncurkan peluru kendali jarak menengah. Ini kedua kalinya dalam 2,5 tahun terakhir. Meskipun program itu masih dalam taraf pengembangan, uji coba itu secara inheren sangat signifikan karena dapat memunculkan ketegangan baru di Semenanjung Korea. Bukan hanya itu, uji coba itu merupakan bukti kegagalan diplomasi Barat menekan Korea Utara.

Ketika Korea Utara meluncurkan roketnya ke orbit pada bulan April 2009, Jepang sempat mengusulkan sidang darurat Dewan Keamanan. Belum sempat sidang darurat itu digelar, Korea Utara telah melakukan uji coba pada Mei 2009 lalu. Karena itu, masyarakat internasional mendesak Dewan Keamanan PBB untuk mengeluarkan resolusi baru yang lebih keras.

Dalam situasi demikian, peran China dan Rusia diperlukan untuk membujuk Korea Utara. Sikap lunak kedua negara ini terhadap Korea Utara seperti halnya pada kasus uji coba rudal Taepodong 2 Korea Utara tahun 2006, hanya menjauhkan Korea Utara dari sanksi-sanksi baru. China sepertinya tidak akan mendukung resolusi yang lebih keras lagi terhadap Korea Utara, karena resolusi dan sanksi semacam itu dikhawatirkan akan mengakibatkan arus pengungsi Korea Utara ke wilayahnya. Ini memberi ruang lebih besar lagi kepada Korea Utara untuk melanjutkan kebijakan uji coba nuklirnya. Keputusan Korea Utara menguji coba nuklir itu bisa jadi merupakan cara untuk menjamin agar

negaranya tetap menjadi perhatian Amerika Serikat. Sehingga dengan berbagai pertimbangan untuk mencapai kepentingan nasionalnya, Korea Utara memutuskan untuk tetap melanjutkan program nuklirnya, meski banyak Negara yang mengecam akan member sanksi yang berat dan Korea Selatan menghentikan bantuan ekonominya.

B. Peningkatan Kekuatan Militer Korea Selatan dan Korea Utara

Security dilemma adalah sebuah konsep yang digunakan dalam hubungan internasional yang berarti sebuah situasi yang tidak menentu, berubah-ubah, dan kecurigaan yang dapat menyebabkan konflik, bahkan jika tidak ada satupun pihak yang menginginkan hal itu. Dengan kata lain keamanan di sebuah Negara dapat mengurangi keamanan di Negara lain. Istilah ini diciptakan oleh John H. Herz dalam bukunya *Political Realism and Political Idealism* pada tahun 1951.²⁴

Istilah security dilemma sering disebutkan pada awal Perang dunia I, pendukung sudut pandang ini berpendapat bahwa kekuatan utama Negara-negara di Eropa merasa dipaksa untuk berperang karena perasaan tidak aman terhadap Negara tetangga mereka, meskipun mereka tidak memiliki hasrat untuk berperang.

Begitu juga yang terjadi di semenanjung Korea, security dilemma dialami oleh Korea Utara dan Korea Selatan. Setelah perang Korea berakhir dengan

²⁴ http://en.wikipedia.org/wiki/Security_dilemma

gencatan senjata pada tahun 1953, interaksi yang terjadi antara kedua Negara dilakukan dengan saling bersaing dan bermusuhan. Pada era 1950-1953 Ketika itu, Korea Utara dengan bantuan sepenuhnya dari Cina, mencoba menggempur pertahanan Korea Selatan yang didukung Amerika Serikat. Meski demikian, gencatan senjata Korea Selatan dan Korea Utara tersebut bukan berarti tercapainya perdamaian kedua korea. Sewaktu-waktu, dengan dipicu oleh isu yang cukup sensitif, kedua Korea tersebut setiap saat bisa kembali ke medan perang untuk saling menghancurkan.

Sepanjang tahun 50-an dan 60-an kedua Korea di semenanjung Korea menjadi bermusuhan. Di sekitar daerah bebas militer sering terjadi serangan kecil dan peristiwa tembak menembak. Kedua pihak sering mengirimkan gerilyawan dan menyusupkan mata-mata ke pihak lawan.²⁵ Setelah perang dihentikan, kedua Negara saling meningkatkan kekuatan pertahanan dan keamanan nasional. Hal ini sempat mengakibatkan perekonomian kedua Negara tidak berkembang, karena anggaran Negara lebih banyak dihabiskan untuk belanja militer.

Seiring perkembangan zaman, perekonomian Korea Selatan mengalami perkembangan yang pesat bahkan saat ini Korea Selatan termasuk ke dalam kategori Negara maju. Sebaliknya, Korea Utara merupakan Negara yang hingga saat ini rakyatnya masih mengalami kekurangan pangan. Perekonomian Korea Utara mengalami kemajuan, namun anggaran keuangan Negara lebih banyak dibelanjakan untuk keperluan militer dan program perkembangan nuklir.

²⁵ Mas' oed Mohtar dan Yang Seung-Yoon. *Memahami Politik Korea*. Gajah Mada University Press, Yogyakarta. 2005. hal 238.

Korea Utara mengadakan uji coba nuklir pada Mei 2009 lalu. Kini negara komunis itu kian mendekati pekerjaan pembuatan bom atom. Diduga, Amerika Serikat dan Korea Selatan sebagai target serangannya. Korea Utara juga melakukan uji tembak sejumlah rudal jarak pendek, yang dirancang untuk serangan ke Korea Selatan dan Jepang. Hal ini membuat pihak Korea Selatan cemas dan khawatir akan adanya serangan nuklir dari Negara tetangganya tersebut. Korea selatan merasa terancam dengan uji coba-uji coba senjata nuklir yang kerap dilakukan oleh Korea Utara. Korea Selatan menganggap uji coba nuklir oleh Korea Utara tidak saja mengancam kemandirian Korea Selatan, akan tetapi juga mengancam stabilitas keamanan di semenanjung Korea.

Berdasarkan pertimbangan adanya ancaman terhadap keamanan negaranya, Korea Selatan berusaha untuk meningkatkan ketahanan nasionalnya dengan meningkatkan kekuatan militernya. Untuk itu Korea Selatan menjalin kerjasama dengan Amerika Serikat dengan melaksanakan latihan militer bersama antara tentara Korea Selatan dengan pasukan Amerika Serikat.

Korea Utara memiliki pasukan artileri terbesar di dunia dan dapat menghantam Seoul seandainya negara komunis itu memutuskan untuk memprovokasi konflik besar-besaran. Pernyataan Jendral Walters Sharp itu diucapkan saat ketegangan meningkat di semenanjung itu. Sharp mengatakan pasukan AS dan Korea Selatan siap perang dan menang setiap saat, dan

selain itu, artileri yang dimiliki Korea Utara sejumlah 17.900 (tujuh belas ribu sembilan ratus), dan Helikopter sampai sejauh ini tidak terdapat catatan akurat mengenai berapa jumlahnya, namun diperkirakan berkisar antara 500 sampai 800. Angkatan Laut, Korea Utara memiliki kapal selam 63, frigat 3, dan kapal Amphibi sejumlah 261.

Angkatan Udara Korea Utara pun cukup luar biasa, dan wajar jika Amerika cukup mencemaskan kemampuan militer Negara ini. Korea Utara memiliki pesawat pembom sekitar 80 buah. Jet tempur 440 buah, pesawat transportasi sebanyak 215 buah.

b. Angkatan Bersenjata Korea Selatan

Untuk tentara aktif, Korea Selatan punya tentara aktif sebesar 687.000 (enam ratus delapan puluh ribu) orang, jadi lebih sedikit dibanding Korea Utara. Tentara cadangan Korea Selatan sebesar 4500.000 (empat juta limaratus ribu) orang. Angkatan Daratnya, Korea Selatan punya 2330 tank, senjata lain sejumlah 4520, artileri sebesar 10.774, dan helikopter 418.

Kekuatan Angkatan laut Korea Selatan punya kapal selam 12. Jauh lebih kecil dibanding Korea Utara. Frigat 9, lebih besar dari Korea Utara. Dan kapal Amphibi 48. Ini sebenarnya cukup mengejutkan,

karena Korea Selatan jauh ketinggalan dibanding Korea Utara yang berhaluan komunis itu.

Bagaimana dengan angkatan udara Korea Selatan? jumlah jet tempurnya cukup berimbang dengan korea Utara yaitu 468 buah. Pesawat transportasi sejumlah 33 buah, jumlah tersebut jauh bila dibandingkan dengan yang dimiliki oleh Korea Utara. Begitu juga dengan helikopter, Korea Selatan hanya memiliki 159 buah. Dilihat dari jumlah penduduk, penduduk Korea Selatan berjumlah 46,5 juta jiwa, sedangkan Korea Utara penduduknya berjumlah 22,7 juta jiwa.

Menurut pemerintah Korea Utara, peningkatan kekuatan militer Korea Selatan tersebut dapat memicu peperangan dan dapat memperburuk hubungan kedua Negara yang sedang mengalami ketegangan tersebut. Disatu sisi pemerintah Korea Selatan meningkatkan kekuatannya untuk mengantisipasi apabila sewaktu-waktu terjadi serangan dari Korea Utara. Namun disisi lain, hal tersebut malah dianggap oleh pihak Korea Utara sebagai rencana dari AS dan Korea Selatan untuk menginvasi negaranya.

Perbedaan pandangan antara kedua pihak ini dapat menimbulkan perlombaan senjata yang akhirnya mempengaruhi stabilitas dan keamanan regional Asia Timur. Karena disaat Korea Selatan meningkatkan kekuatan militernya dan memperkuat pasukan serta mempercanggih persenjataan, maka disaat itu pula Korea Utara melakukan hal yang sama bahkan Korea Utara akan

lebih meningkatkan kekuatannya agar bisa menandingi Negara tetangganya Korea Selatan. Hal ini dapat memicu kedua Korea ke ambang perang.

1. Peningkatan Kekuatan Militer Korea Selatan

Suka atau tidak suka pasca tes ledak bom nuklir Korea Utara di bawah tanah pada bulan Oktober 2006 lalu, Korea Utara telah mencapai symbolic nuclear deterrent, yaitu kepemilikan senjata nuklir yang simbolis dan terbatas dari segi kekuatan dan jangkauan. Tingkat kemampuan nuklir selanjutnya adalah operational nuclear deterrent, yaitu kemampuan senjata nuklir dalam jumlah besar ditunjang sistem senjata nuklir yang matang dan teruji, layaknya senjata nuklir Amerika Serikat dan Rusia. Perjalanan dari kemampuan symbolic nuclear deterrent menuju operational nuclear deterrent masih membutuhkan lebih banyak riset dan uji coba yang berpotensi meletuskan konflik sebagaimana peluncuran roket Korea Utara awal tahun 2009 lalu.

Perkembangan teknologi persenjataan yang dimiliki Korea Utara semakin membuat Korea Selatan khawatir. Rudal dan senjata nuklir yang dimiliki Korea Utara dapat menjadi ancaman bagi keamanan nasional Korea Selatan. Hal ini dikarenakan rudal balistik yang dikembangkan Korea Utara memiliki kemampuan untuk menjangkau seluruh wilayah Korea Selatan yang merupakan salah satu sekutu Amerika Serikat tersebut.

Korea Selatan merupakan salah satu target sasaran dari serangan rudal-rudal Korea Utara sejak lama. Sebagai langkah pencegahan untuk mengantisipasi apabila sewaktu-waktu Korea Utara melancarkan serangan ke Korea Selatan, maka Korea Selatan meningkatkan kemampuan militernya untuk memperkuat pertahanan nasionalnya. Selain itu Korea Selatan juga semakin giat meningkatkan kerjasama keamanan dengan Amerika Serikat. AS dan Korea Selatan sering melakukan latihan militer bersama. Amerika Serikat juga menempatkan sekitar 32.000 personel militernya di wilayah Korea Selatan.

Keberhasilan program nuklir Korea Utara sangat berpengaruh terhadap keamanan Korea Selatan, dimana kekhawatiran Seoul atas ancaman serangan nuklir dari Korea Utara pun semakin meningkat. Untuk itu Korea Selatan melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan sistem pertahanan keamanan negaranya dengan dukungan "payung nuklir" Amerika Serikat dari Amerika Serikat guna menghalau serangan maupun nuklir dari Korea Utara. Meskipun Korea Selatan mendapatkan dukungan keamanan dari Amerika Serikat, tetapi Seoul juga berkeinginan untuk meningkatkan kemampuan militer dan persenjataannya sendiri untuk mengantisipasi serangan dari Korea Utara.

Minggu pagi, 5 April 2009 waktu setempat, Korea Utara akhirnya meluncurkan roket dari Musudan-ri, sebuah fasilitas militer di pesisir timur Korea Utara. Klaim Korea Utara bahwa peluncuran roket ini adalah misi penempatan satelit komunikasinya dianggap sebagai tipuan oleh Amerika Serikat dan Jepang. Keduanya meyakini bahwa di balik alasan resmi tersebut Korea Utara berusaha

menguji hasil pengembangan daya jangkau peluru kendalinya yang diperkirakan memiliki jangkauan hingga wilayah Alaska, sebagai bagian dari program senjata nuklir Korea Utara.

Menanggapi aksi Korea Utara tersebut, Dewan Keamanan PBB segera mengeluarkan pernyataan kecamanannya dan menegaskan bahwa peluncuran roket Korut telah melanggar resolusi DK PBB nomor 1718. Tidak terima dengan kecaman Dewan Keamanan PBB tersebut, Korea Utara mengancam akan meninggalkan perundingan enam pihak (Six-Party Talk) dan mengaktifkan kembali reaktor nuklirnya di Yongbyon yang telah dimatikan sejak tahun 2007. Korea Utara bahkan bertindak lebih jauh lagi dengan mengusir Tim inspeksi IAEA dari instalasi nuklirnya di Yongbyon. Perkembangan ini merupakan sebuah setback yang signifikan bagi perundingan Six-Party Talk.

Inilah yang terjadi ketika Korea Utara secara sepihak melakukan uji coba sejumlah senjata rudalnya. Bahkan bukan itu saja, Korea Utara juga menguji coba bom nuklirnya, sehingga memicu kecaman Dewan Keamanan PBB. Korea Utara sepertinya cukup kesal dengan bergabungnya militer Korea Selatan dalam prakarsa keamanan proliferasi atau Proliferation Security Initiative (PSI) yang disponsori oleh Amerika Serikat. Melalui payung PSI ini, Korea Selatan berhak mencegat kapal-kapal Korea Utara yang diduga membawa bahan-bahan persenjataan nuklir dan rudal. Selain itu kerjasama antara Amerika Serikat dan Korea Selatan di bidang militer juga membuat Korea Utara menganggap hal tersebut sebagai bagian dari rencana untuk melakukan serangan terhadap Korea Utara oleh Amerika Serikat dan sekutunya.

Komandan penting militer AS di Korea Selatan (Korsel), mengatakan Korea Utara memiliki pasukan artileri terbesar di dunia dan dapat menghantam Seoul seandainya negara komunis itu memutuskan untuk memprovokasi konflik besar-besaran. Pernyataan Jendral Walters Sharp itu diucapkan saat ketegangan meningkat di semenanjung itu. Korea Utara mempertahankan 80.000 personil pasukan khusus dan diperkirakan memiliki 13.000 laras artileri yang dikerahkan di sepanjang perbatasan kedua negara, kata Sharp²⁸. Korea Utara dilaporkan telah memindahkan peluru-peluru kendali Taepodong-2 ke tempat peluncurannya di pantai timur laut Korut. Taepodong-2 diyakini mampu mencapai Alaska, Amerika Serikat.

Negara komunis itu mengatakan mereka mempunyai hak untuk mengembangkan program pengembangan luar angkasa. Korea Utara menuduh Presiden Lee menghancurkan hubungan kedua negara bersaudara itu dan telah mengumumkan bahwa pakta nonagresi yang disepakati tahun 1992, serta berbagai perjanjian antara kedua Korea, sekarang tidak berlaku lagi. Hubungan lintas perbatasan berada pada titik terburuk dalam satu dasawarsa setelah Presiden Korea Selatan Lee Myung Bak meninggalkan kebijakan presiden Korea Selatan sebelumnya yang memberikan bantuan hampir semuanya tanpa syarat kepada Korea Utara.

²⁸ <http://hariansib.com/?p=71550>

Pada Tahun 2010 Korea Selatan berencana menaikkan anggaran militer menjadi delapan persen dari produk domestik bruto (PDB). Kebijakan itu dilakukan untuk menghadapi ancaman Korea Utara yang telah melakukan uji coba nuklir dan rudal yang memicu ketegangan di Semenanjung Korea. Anggaran belanja 2010 Korea Selatan mencapai 30,8 triliun won (US\$ 24,1 miliar), termasuk 109,3 miliar won tambahan anggaran baru.²⁹ Berdasarkan anggaran itu Korea Selatan berusaha memberikan prioritas meningkatkan kekuatan pertahanan terhadap ancaman Korea Utara.

Selama beberapa tahun terakhir Korea Selatan telah memodernisasi militernya yang berkekuatan 670.000 prajurit. Itu dilakukan untuk mencegah serangan Korea Utara, yang didukung 1,2 juta tentara. Kedua Korea secara teknik masih dalam keadaan perang karena keduanya tak pernah menandatangani perjanjian perdamaian untuk mengakhiri perang sipil pada 1950-1953. Sekitar 28.500 tentara Amerika Serikat berada di Korea Selatan untuk mendukung kekuatan militer Seoul.

Pemerintah Korea Selatan juga akan membelanjakan 23 triliun won untuk membangun tank-tank baru. Kapal pendarat amfibi dan senjata artileri bergerak K-9. Korea Selatan juga akan mengalokasikan 1,6 triliun won untuk membangun kapal-kapal perusak dan kapal selam. Untuk bidang pesawat udara dialokasikan 1,3 triliun won, termasuk pembelian pesawat-pesawat tempur F-15 dan pesawat-

²⁹ <http://metrotvnews.com/index.php/metromain/news/2009/07/09/548/Korsel-akan-Naikkan-Anggaran-Militer>

pesawat pengintai. Sedangkan 1,5 triliun won akan dibelanjakan untuk pembuatan sistem pertahanan rudal.

Peningkatan anggaran militer Korea Selatan ini, tidak lain adalah sebagai langkah untuk meningkatkan ketahanan nasional negaranya dan sebagai langkah persiapan apabila negaranya diserang oleh Korea Utara. Korea Selatan merasa terancam dengan adanya pengembangan nuklir Korea Utara. Oleh karena itu, pihak Korea Selatan berusaha agar ancaman tersebut dapat diatasi dengan ketahanan nasional yang tangguh dan kemampuan militer yang tinggi. Karena Korea Selatan menganggap saat ini negaranya bisa kapan saja diserang oleh Korea Utara yang memiliki pertahanan militer yang kuat dan senjata nuklir yang sangat dahsyat dampaknya.

2. Peningkatan Kekuatan Militer Korea Utara

Kondisi keamanan di semenanjung Korea memang bersikap fluktuatif. Terkadang memanas namun ketegangan bisa sewaktu-waktu mereda. Maka untuk mengantisipasi apabila terjadi serangan dari pihak Korea Utara. Korea Selatan mengambil langkah deterrence dengan meningkatkan kemampuannya untuk meningkatkan keamanan dan ketahanan Nasional. Namun, justru langkah yang diambil oleh Korea Selatan ini semakin membuat keadaan di semenanjung Korea mengalami ketegangan.

Pada bulan Februari 2009 Korea Utara, menggertak sepenuhnya siap untuk berperang dengan Korea Selatan. Hal itu dipicu oleh sikap bermusuhan rezim Pemerintah Korea Selatan di bawah Presiden Lee Myung-bak terhadap rezim komunis Korea Utara. KCNA menyatakan mengancam latihan rutin bersama yang dilakukan oleh pasukan Korea Selatan dan Korea Utara, serta mengancam kedua Negara akan membayar mahal apa yang mereka anggap sebagai persiapan perang itu.

Peringatan itu disampaikan oleh kantor berita resmi Korea Utara setelah komando pasukan gabungan AS-Korsel mengatakan bahwa mereka akan melakukan latihan tahunan bersandi "Key Resolve/Foal Eagle", yang berlangsung 9-20 Maret 2009 di wilayah Semenanjung Korea. Baik AS maupun Korea Selatan menegaskan bahwa latihan bersama itu sepenuhnya untuk keperluan pertahanan.³⁰

KCNA mengatakan, armada Amerika Serikat (AS) terus melakukan gerakan-gerakan guna mematangkan semua persiapan untuk melakukan serangan pre-emptif terhadap Korea Utara. AS berbicara mengenai apa yang disebut dialog dan perdamaian di semenanjung Korea, tetapi sesungguhnya berusaha untuk meningkatkan konfrontasi militer. Meskipun Korea Selatan dan Amerika Serikat menyatakan latihan tersebut merupakan latihan rutin tahunan, Korea Utara menilai hal itu suatu ancaman yang mencetuskan perang Korea kedua. Pasukan perang khusus, jika digabungkan dengan Korea Utara senjata kimia, tidak bisa

³⁰ <http://internasional.kompas.com/read/xml/2009/02/20/02545913/Korut.Siap.Perangi.Korsel>

hanya menimbulkan kerusakan besar tetapi juga dapat menimbulkan kepanikan yang luar biasa bagi Korea Selatan.

"Satu perang akan pecah jika imperialis AS dan penghasut perang Korsel menerjunkan pasukan dalam jumlah besar dan melancarkan serangan yang berarti mengundang sebuah serangan," ungkap media pemerintah Korea Utara.³¹ Lebih 600.000 tentara Korea Selatan didukung 28.500 tentara Amerika Serikat dikirimkan ke semenanjung Korea untuk menghadapi potensi ancaman Korea Utara yang mempunyai kekuatan militer 1,1 juta prajurit.

Sejumlah pengamat menilai Korut saat ini sedang berbenah diri memperkuat pertahanan mereka pada masa mendatang termasuk menggiatkan teknologi rudal berhulu ledak dan senjata atom (nuklir). Sejumlah pengamat lain menilai aksi Pyongyang itu hanya gertakan untuk menjamin Korut tetap menjadi prioritas pemerintahan Presiden AS Barack Obama dan memaksa Korsel mengubah posisi kerasnya.

Oleh karena itu, untuk mencegah terjadinya konflik yang lebih besar yang berujung pada peperangan, perlu dilakukan rekonsiliasi dan pembicaraan antara kedua belah pihak untuk saling menjaga perdamaian dan stabilitas semenanjung Korea dan Asia Timur.

³¹ <http://newspaper.plikiran-rakyat.com/prprint.php?mib=beritadetail&id=64127>